

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur				
Tahun Penilaian	: 2023				
Tujuan Strategis	: Terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan				
Urusan Pemerintahan	: Urusan Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Kemungkinan *)	Skala Dampak*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f = d x e
I Risiko Strategis OPD					
1	Nilai SAKIB Kurang dari 81,85	RSO.SEK.01	1	3	3
2	Jumlah angkatan kerja yang terserap lapangan kerja kecil	RSO.BID01.01	3	4	12
3	Pada tahap perencanaan Isi kegiatan pelatihan pada sub kegiatan tidak secara langsung mendukung indikator kinerja yang dimaksud	RSO.BID01.02	2	3	6
4	Hubungan industrial tidak kondusif	RSO.BID01.03	2	4	8
5	Belum ada follow up hasil penyuluhan dan bimbingan jabatan	RSO.BID01.04	4	4	16
6	Nilai investasi daerah lebih rendah dibandingkan tahun lalu	RSO.BID02.01	1	2	2
7	Keterlambatan penetapan PerDa terkait pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.	RSO.BID02.02	4	2	8
8	Penetapan PerDa yang terhambat.	RSO.BID02.03	4	2	8
9	Pemohon izin tidak mendapat notifikasi status perizinan yang diajukan	RSO.BID03.01	4	2	8
10	Aplikasi perizinan mengalami kendala sehingga mengganggu kelancaran proses perizinan	RSO.BID03.02	1	4	4
11	Pengawasan untuk Pelaku Usaha yang menjual minuman beralkohol masih belum optimal	RSO.BID03.03	3	3	9
12	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal belum optimal	RSO.BID03.04	3	3	9
13	masyarakat tidak puas dengan hasil konsultasi dan tindak lanjut pengaduan	RSO.BID03.05	3	3	9
14	Pelaku usaha/investor tidak jadi melakukan ekspansi usaha di Kota Malang	RSO.BID04.01	3	4	12
15	Pemenuhan pertanggungjawaban dokumen penerbitan perizinan dan nonperizinan tidak sesuai yang dipersyaratkan	RSO.BID04.02	1	3	3
16	SDM pelaksana menerima gratifikasi/suap dari pelaku usaha atas layanan percepatan proses penerbitan perizinan dan nonperizinan	RSO.BID04.03	1	3	3
17	Perizinan terbit tanpa melalui proses seharusnya yang menjadi kewenangan daerah	RSO.BID04.04	1	4	4
18	Bukti pendukung persyaratan perizinan tidak sesuai standar/patsu	RSO.BID04.05	3	3	9
II Risiko Operasional OPD					
SEKRETARIAT					
1	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA)	ROO.SEK.01	1	3	3
2	Keterlambatan dalam penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (LKJIP, Monev, LKPJ, LPPD, LKPD)	ROO.SEK.02	1	4	4
3	Kelidaksesuaian perencanaan kebutuhan dengan Pagu anggaran	ROO.SEK.03	3	2	6
4	Kelidaksesuaian kode belanja.	ROO.SEK.04	1	4	4
5	Pengajuan SPP-GU/LS belanja barang dan jasa terlambat	ROO.SEK.05	2	3	6
6	Realisasi/serapan anggaran tidak mencapai target	ROO.SEK.06	1	3	3
7	Kelidakterlibat data barang milik daerah SKPD	ROO.SEK.07	1	3	3
8	Kehilangan/kerusakan barang milik daerah SKPD	ROO.SEK.08	2	4	8
9	Penyusunan laporan rekapitulasi absensi tidak akurat dan tidak tepat waktu	ROO.SEK.09	1	4	4
10	Kebutuhan Kantor tidak terfasilitasi	ROO.SEK.10	1	4	4
11	Pengadaan barang tidak sesuai kebutuhan	ROO.SEK.11	1	4	4
12	Surat dinas tidak terkirim	ROO.SEK.12	3	2	6
13	Kerusakan barang milik daerah	ROO.SEK.13	1	4	4
BIDANG 1 (BIDANG TENAGA KERJA)					
1	Peserta pelatihan tidak sesuai sasaran/kriteria	ROO.BID01.01	2	3	6
2	Peserta pelatihan tidak memenuhi kompetensi	ROO.BID01.02	1	3	3
3	Tidak seluruh LPK yang terdaftar di kota malang mengikuti kegiatan bimtek	ROO.BID01.03	1	4	4
4	Peserta bimtek tidak sesuai sasaran	ROO.BID01.04	2	4	8
5	Narasum kurang bisa menyampaikan materi dengan baik	ROO.BID01.05	1	4	4
6	Sasaran utama/ Perusahaan yang tidak mempunyai PP tidak menghadiri undangan	ROO.BID01.06	2	4	8
7	Demo mayday tetap terjadi (di sbj)	ROO.BID01.07	1	2	2
8	Peserta sosialisasi UMK tidak sesuai sasaran	ROO.BID01.08	1	4	4
9	Perselisihan Perusahaan dan pekerja terkait UMK	ROO.BID01.09	3	4	12
10	Peserta peningkatan kapasitas tidak semua bisa ikut	ROO.BID01.10	2	4	8
BIDANG 2 (BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL)					
1	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal (pameran, duta investasi, forum bisnis, match making, pembuatan company profile) tidak tepat waktu.	ROO.BID02.01	2	2	4
BIDANG 3 (BIDANG PENGENDALIAN, PENGADUAN, DATA DAN INFORMASI)					
1	Data dan informasi perizinan dan non perizinan kurang akurat	ROO.BID03.01	3	3	9
2	Kurangnya pembinaan pelaksanaan penanaman modal	ROO.BID03.02	3	3	9
BIDANG 4 (BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN EKONOMI, PARIWISATA, DAN SOSIAL BUDAYA)					
1	Keterlambatan pemrosesan penerbitan pengajuan perizinan dari Pelaku usaha	ROO.BID4.01	3	3	9
2	Komplain dari pelaku usaha atas keterlambatan proses layanan perizinan dan non perizinan	ROO.BID4.02		3	9
BIDANG 5 (BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEKERJAAN UMUM)					
1	Keterlambatan penerbitan ijin	ROO.BID5.01	3	1	3
2	Kelidaktepatan pemberian lokasi izin untuk KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	ROO.BID5.02	2	1	2
3	Komplain warga atas penerbitan ijin PBG	ROO.BID5.03	2	1	2

Menyetujui,
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I
19790709 199810 1 001